



**WALIKOTA SOLOK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**  
**NOMOR 30 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) huruf e dan Pasal 93 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Analisa Standar Belanja dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;



## **MEMUTUSKAN**

Metapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

## **BAB I**

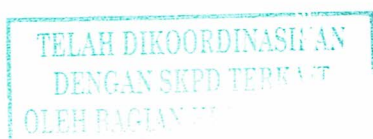
### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok selanjutnya diingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
8. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Persetujuan Walikota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Kontrak, Pegawai Kontrak Sukarela, Guru Tidak Tetap, Penjaga Kantor, Satpam, Petugas Kebersihan Kantor dan lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.



16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyesuaian APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Standar Biaya Umum adalah Satuan Biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/indeks satuan biaya yang digunakan oleh Perangkat Daerah.
24. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.



**BAB II**  
**ANALISA STANDAR BELANJA**

**Pasal 2**

Analisa Standar Belanja bertujuan :

- a. untuk memberikan pedoman dalam menetapkan plafon anggaran kegiatan perangkat daerah dengan mengukur beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.
- b. untuk menyusun RKA-SKPD secara tertib, efektif, efisien, bermanfaat dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan di Perangkat Daerah.
- c. untuk terciptanya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran belanja.

**Pasal 3**

Analisa Standar Belanja meliputi :

- a. analisa Standar Belanja Umum yaitu Analisa Standar Belanja yang berlaku secara umum dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah
- b. analisa Standar Belanja Khusus yaitu Analisa Standar Belanja yang berlaku secara Khusus dan hanya digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

**Pasal 4**

- (1) Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; dan
- (2) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

## Pasal 5

Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 28 September 2018



**WALIKOTA SOLOK**  
  
**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 28 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**



**RUSDianto**

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 30

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018

TENTANG : ANALISA STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2019

ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	4.915.200	
2	DINAS KESEHATAN	4.718.400	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.806.400	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.000.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.194.400	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.939.200	
7	DINAS SOSIAL	2.971.200	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.907.200	
9	DINAS PANGAN	2.776.800	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.710.400	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.452.800	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.972.000	
13	DINAS PERHUBUNGAN	3.160.800	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.194.400	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	3.547.200	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.841.600	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.194.400	
18	DINAS PARIWISATA	3.261.600	
19	DINAS PERTANIAN	6.256.800	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	4.358.400	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.967.200	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	5.229.600	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.100.800	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.712.000	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.976.000	
26	SEKRETARIAT DAERAH	8.553.600	
27	SEKRETARIAT DPRD	2.973.600	
28	INSPEKTORAT	2.460.000	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	10.509.600	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	9.643.200	



## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	151.522.560	
2	DINAS KESEHATAN	89.298.720	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	46.738.440	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.937.920	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	21.845.880	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13.159.440	
7	DINAS SOSIAL	13.665.960	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30.449.160	
9	DINAS PANGAN	14.590.800	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32.235.840	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	72.369.360	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22.715.280	
13	DINAS PERHUBUNGAN	22.992.480	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.850.040	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	21.316.680	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	22.836.240	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	17.254.440	
18	DINAS PARIWISATA	29.899.800	
19	DINAS PERTANIAN	76.078.800	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	40.582.080	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21.966.840	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	73.077.480	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	34.327.440	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	26.631.360	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.315.680	
26	SEKRETARIAT DAERAH	170.939.160	
27	SEKRETARIAT DPRD	37.941.120	
28	INSPEKTORAT	70.003.080	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	13.875.120	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	8.688.960	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	41.208.540	
2	DINAS KESEHATAN	6.312.735	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13.233.690	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.710.040	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.463.155	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.523.425	
7	DINAS SOSIAL	5.604.780	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.035.405	
9	DINAS PANGAN	4.759.485	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.335.230	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.522.070	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.248.970	
13	DINAS PERHUBUNGAN	8.516.715	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.139.425	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	5.635.845	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.734.565	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.099.565	
18	DINAS PARIWISATA	8.891.130	
19	DINAS PERTANIAN	19.968.255	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	12.661.440	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.939.560	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	21.261.540	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	15.503.070	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.687.770	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.916.445	
26	SEKRETARIAT DAERAH	72.461.565	
27	SEKRETARIAT DPRD	14.912.835	
28	INSPEKTORAT	19.634.715	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	4.965.495	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	3.330.495	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	12.696.000	
2	DINAS KESEHATAN	10.464.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.140.000	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.088.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.992.000	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.802.000	
7	DINAS SOSIAL	7.272.000	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.364.000	
9	DINAS PANGAN	1.590.000	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.344.000	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.006.000	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.464.000	
13	DINAS PERHUBUNGAN	4.908.000	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.130.000	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.914.000	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	10.800.000	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.256.000	
18	DINAS PARIWISATA	15.138.000	
19	DINAS PERTANIAN	4.392.000	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	164.544.000	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.522.880	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.614.000	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.528.000	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.700.000	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.498.000	
26	SEKRETARIAT DAERAH	13.308.000	
27	SEKRETARIAT DPRD	23.568.000	
28	INSPEKTORAT	9.240.000	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	14.520.000	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	4.014.000	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	36.812.160	
2	DINAS KESEHATAN	22.758.120	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.592.720	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.476.320	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.116.880	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.589.040	
7	DINAS SOSIAL	28.043.400	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.258.240	
9	DINAS PANGAN	4.703.160	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	93.213.120	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.355.960	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14.118.720	
13	DINAS PERHUBUNGAN	12.668.040	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.976.200	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	6.394.080	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	33.458.040	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	24.338.160	
18	DINAS PARIWISATA	59.413.200	
19	DINAS PERTANIAN	3.853.080	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	643.492.080	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	24.684.106	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	20.254.080	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	5.377.680	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.672.200	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.524.360	
26	SEKRETARIAT DAERAH	49.350.840	
27	SEKRETARIAT DPRD	1.034.880	
28	INSPEKTORAT	25.336.080	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	54.673.080	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	14.747.040	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	27.468.000	
2	DINAS KESEHATAN	80.052.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.064.000	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	23.268.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	25.662.000	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	19.572.000	
7	DINAS SOSIAL	23.562.000	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.230.000	
9	DINAS PANGAN	17.892.000	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	71.190.000	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.482.000	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.524.000	
13	DINAS PERHUBUNGAN	22.008.000	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.600.000	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	19.488.000	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.550.000	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.700.000	
18	DINAS PARIWISATA	12.306.000	
19	DINAS PERTANIAN	33.390.000	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	37.800.000	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.514.000	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	21.966.000	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	19.656.000	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.144.000	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.366.000	
26	SEKRETARIAT DAERAH	90.930.000	
27	SEKRETARIAT DPRD	37.506.000	
28	INSPEKTORAT	18.144.000	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	70.644.000	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	26.586.000	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Rapar-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	170.100.000	
2	DINAS KESEHATAN	241.920.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	292.950.000	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	268.380.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	251.370.000	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	122.850.000	
7	DINAS SOSIAL	164.430.000	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	209.790.000	
9	DINAS PANGAN	311.850.000	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	266.490.000	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	192.780.000	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	241.920.000	
13	DINAS PERHUBUNGAN	279.720.000	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	240.030.000	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	274.050.000	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	200.340.000	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	291.060.000	
18	DINAS PARIWISATA	217.350.000	
19	DINAS PERTANIAN	408.240.000	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	255.150.000	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	306.180.000	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	338.310.000	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	175.770.000	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	204.120.000	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111.510.000	
26	SEKRETARIAT DAERAH	773.010.000	
27	SEKRETARIAT DPRD	160.650.000	
28	INSPEKTORAT	119.070.000	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	625.590.000	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	532.980.000	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Biaya Lembur

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	250.656.000	
2	DINAS KESEHATAN	538.910.400	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	179.935.200	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	144.127.200	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	164.269.200	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	106.081.200	
7	DINAS SOSIAL	155.764.800	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	147.260.400	
9	DINAS PANGAN	108.766.800	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	319.586.400	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	102.052.800	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	191.572.800	
13	DINAS PERHUBUNGAN	180.382.800	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	131.146.800	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	140.098.800	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	108.766.800	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	132.937.200	
18	DINAS PARIWISATA	128.908.800	
19	DINAS PERTANIAN	283.330.800	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	258.712.800	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	165.612.000	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	244.389.600	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	175.459.200	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	108.319.200	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	112.347.600	
26	SEKRETARIAT DAERAH	501.759.600	
27	SEKRETARIAT DPRD	143.679.600	
28	INSPEKTORAT	120.404.400	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	368.374.800	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	354.051.600	

## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bimbingan Teknis dan sejenisnya)

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	273.600.000	
2	DINAS KESEHATAN	1.041.960.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	241.680.000	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	196.080.000	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	348.840.000	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	133.380.000	
7	DINAS SOSIAL	202.920.000	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	124.260.000	
9	DINAS PANGAN	100.320.000	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	597.360.000	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	111.720.000	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	231.420.000	
13	DINAS PERHUBUNGAN	282.720.000	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	145.920.000	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	163.020.000	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	94.620.000	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	150.480.000	
18	DINAS PARIWISATA	117.420.000	
19	DINAS PERTANIAN	373.920.000	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	385.320.000	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	199.500.000	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	297.540.000	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	241.680.000	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	104.880.000	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	58.140.000	
26	SEKRETARIAT DAERAH	753.540.000	
27	SEKRETARIAT DPRD	155.040.000	
28	INSPEKTORAT	107.160.000	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	385.320.000	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	365.940.000	



## ANALISA STANDAR BIAYA UMUM (ASB-U)

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

No	OPD	Jumlah Pagu	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN	10.692.900	
2	DINAS KESEHATAN	8.338.500	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.971.300	
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.069.400	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	13.832.100	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.886.000	
7	DINAS SOSIAL	11.281.500	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29.920.500	
9	DINAS PANGAN	16.284.600	
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	43.458.300	
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.199.300	
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.063.200	
13	DINAS PERHUBUNGAN	36.591.300	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.183.400	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8.632.800	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	30.509.100	
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18.246.600	
18	DINAS PARIWISATA	10.692.900	
19	DINAS PERTANIAN	10.398.600	
20	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, UKM	10.889.100	
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.123.300	
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	17.952.300	
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	29.135.700	
24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.654.900	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.870.100	
26	SEKRETARIAT DAERAH	10.791.000	
27	SEKRETARIAT DPRD	11.575.800	
28	INSPEKTORAT	14.028.300	
29	KECAMATAN LUBUK SIKARAH	14.813.100	
30	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	19.816.200	

**ANALISA STANDAR BIAYA KHUSUS BERLAKU UMUM**

Nama Kegiatan : Sosialisasi Dalam Daerah (Setengah Hari)

Standar Ukuran :

1. Jumlah Alat Tulis Kantor
2. Jumlah Makanan dan Minuman

Asumsi Perhitungan :

1. Pelaksanaan Sosialisasi berakhir paling cepat jam istirahat siang (jam 13.00 WIB)

<b>1</b>	<b>Kebutuhan Belanja per Peserta Sosialisasi :</b>	
	- Alat tulis peserta (paket)	15.000
	- Snack pagi peserta	10.000
	- Makan Siang peserta	20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>45.000</b>
<b>2</b>	<b>Kebutuhan Belanja Utama yang tidak terkait dengan jumlah peserta :</b>	
	- Honorarium Narasumber	
	- Snack panitia dan narasumber	
	- Makan panitia dan narasumber	
	- Alat tulis kantor	
	- Sewa tempat / gedung	

**ANALISA STANDAR BIAYA KHUSUS BERLAKU UMUM**

**Nama Kegiatan :** Sosialisasi Dalam Daerah (Sehari Penuh)

**Standar Ukuran :**

1. Jumlah Alat Tulis Kantor
2. Jumlah Makanan dan Minuman

**Asumsi Perhitungan :**

1. Pelaksanaan Sosialisasi berakhir paling cepat jam jam 16.30 sore

**1 Kebutuhan Belanja per Peserta Sosialisasi :**

- Alat tulis peserta (paket)	15.000
- Snack pagi peserta	10.000
- Makan Siang peserta	20.000
- Snack sore peserta	10.000

Jumlah 55.000

**2 Kebutuhan Belanja Utama yang tidak terkait dengan jumlah peserta :**

- Honorarium Narasumber
- Snack panitia dan narasumber
- Makan panitia dan narasumber
- Alat tulis kantor
- Sewa tempat / gedung

**ANALISA STANDAR BIAYA KHUSUS BERLAKU UMUM**

Nama Kegiatan : Bimbingan Teknis

Standar Ukuran :

1. Jumlah Alat Tulis Kantor
2. Jumlah Makanan dan Minuman

Asumsi Perhitungan :

1. Pelaksanaan Bimbingan Tenis Sehari Penuh dan Minimal 2 Hari

**1 Kebutuhan Belanja per Peserta Bimbingan Teknis :**

Biaya per hari per peserta

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| - Snack pagi peserta  | 10.000 |
| - Makan Siang peserta | 20.000 |
| - Snack sore peserta  | 10.000 |

Jumlah biaya per hari per peserta 40.000

Biaya per peserta

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| - Alat tulis peserta (paket) | 25.000 |
|------------------------------|--------|

**Jumlah per peserta 25.000**

**2 Kebutuhan Belanja Utama yang tidak terkait dengan jumlah peserta :**

- Honorarium Narasumber
- Snack panitia dan narasumber
- Makan panitia dan narasumber
- Alat tulis kantor
- Sewa tempat / gedung

**ANALISA STANDAR BIAYA KHUSUS BERLAKU UMUM**

Nama Kegiatan : Rapat-Rapat (Setengah Hari)

Standar Ukuran : 1. Jumlah Makanan dan Minuman

Asumsi Perhitungan :

1. Pelaksanaan Rapat berakhir sebelum jam istirahat siang
2. Pelaksanaan Rapat setelah istirahat siang

**1 Kebutuhan Belanja per Peserta Rapat :**

- Snack pagi peserta 10.000

**Jumlah 10.000**

**ANALISA STANDAR BIAYA KHUSUS BERLAKU UMUM**

Nama Kegiatan : Rapat-Rapat (Setengah Hari)

Standar Ukuran :

1. Jumlah Makanan dan Minuman

Asumsi Perhitungan :

1. Pelaksanaan Rapat berakhir paling cepat jam 16.00 sore

**1 Kebutuhan Belanja per Peserta Rapat :**

- Snack pagi peserta	10.000
- Makan Siang peserta	20.000
- Snack sore peserta	10.000

**Jumlah 40.000**

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

BALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN f



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

**S O L O K**

Solok, 27 September 2018  
Muharram 1440 H

Nomor : 910/683/BKD/2018

Kepada :

Yth. Bpk. WalikotaSolok

di

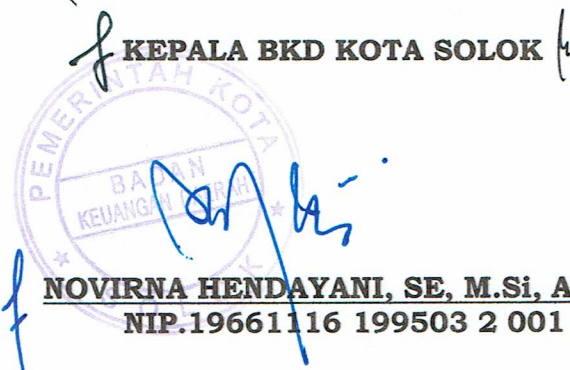
**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Peraturan WalikotaSolok
- Tentang : Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019
- Catatan : Peraturan Walikota ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan WalikotaSolok

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BKD KOTA SOLOK**

  
**NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt**  
**NIP.19661116 199503 2 001**